

HASIL PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN MASYARAKAT SIPIL DI INDONESIA TAHUN 2002

1 DEFINISI DAN SPEKTRUM MASYARAKAT SIPIL

1.1 Definisi

Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, proses pengukuran tingkat “kesehatan” masyarakat sipil diawali dengan kesepakatan atas definisi masyarakat sipil. Proses ini didukung dengan seminar setengah hari yang mengangkat tema utama berkenaan dengan teori-teori masyarakat sipil serta pengenalan definisi baku yang digunakan oleh Civicus.

Pada dasarnya definisi yang ditawarkan Civicus kurang terfokus pada ide tentang sektor-sektor dan bagaimana masyarakat terbagi atas dasar hal itu. Definisi ini lebih terkonsentrasi pada sebuah panggung atau lingkaran dimana warga mengasosiasikan dirinya sendiri. Karena panggung ini sangat dimungkinkan hanya memiliki batasan yang kabur, maka maksud yang menjadi landasan dalam menganalisis dan memahami adalah menjamin keberadaan berbagai pengakuan dan juga memberikan ruang bagi hal-hal yang mungkin berada di luar lingkup ini. Berikut definisi masyarakat sipil yang dimiliki Civicus:

“Sebuah arena, yang berlainan dari negara dan pasar, dimana anggota masyarakat berkelompok dan berinteraksi satu dengan yang lain untuk mendefinisikan, menyatakan, dan mendorong nilai-nilai, hak-hak dan kepentingan-kepentingan mereka.”

Dari Lokakarya Pengukuran Indeks Masyarakat Sipil yang dilakukan oleh Yappika di 6 region, pada proses penentuan definisi masyarakat sipil dua region menolak definisi dari Civicus. Dua region tersebut, Sumatera dan Jabotabek, merubah sama sekali landasan pikir tersebut sehingga membuat definisi baru. Definisi yang dihasilkan kedua region tersebut tidak terkonsentrasi pada sebuah panggung atau lingkaran dimana warga mengasosiasikan dirinya sendiri. Sementara region yang menyepakati seluruh definisi Civicus adalah region Nusa Tenggara, Jawa-Bali dan Sulawesi-Papua. Sedangkan region Kalimantan memunculkan definisi baru yang hampir mirip dengan Civicus, perbedaannya ada pada penekanan penggunaan kata atau “*rasa bahasa*”. Secara rinci hasil definisi yang disepakati di masing-masing region dapat dilihat sebagai berikut:

? **Region Kalimantan**

“Sebuah arena, yang berlainan dari negara dan pasar, tempat anggota masyarakat berkelompok-kelompok dan berinteraksi satu dengan lainnya untuk mendefinisikan, menyatakan, dan mendorong nilai-nilai, hak-hak dasar kemanusiaan, serta kepentingan-kepentingan khusus mereka”.

? **Region Sumatera**

“Individu/kelompok masyarakat yang memiliki nilai-nilai atau norma dan secara sistematis mendorong terjadinya relasi seimbang menuju masyarakat yang adil dan setara”.

? **Region Jabotabek**

“Individu atau kelompok di luar negara dan pasar yang berinteraksi untuk memperjuangkan nilai-nilai, hak-hak dan kepentingan-kepentingannya”.

? **Region Nusa Tenggara**

Region ini menyepakati 5 definisi, sedangkan untuk kepentingan proses lokakarya disepakati menggunakan definisi Civicus sebagai definisi kerja (*working definition*). Kelima definisi tersebut adalah:

- ≠ *Komunitas di luar negara dan pasar yang aktif melakukan interaksi antar anggota komunitas maupun di luar komunitasnya, serta berinteraksi dengan negara dan pasar secara rasional, kritis dan tidak emosional untuk mendorong terciptanya perubahan sosial dan tata kehidupan yang demokratis, adil dan setara.*
- ≠ *Suatu kelompok masyarakat/komunitas dan individu yang berciri kemandirian, kesukarelaan, kesepakatan, memiliki tata nilai atau norma dan saling berinteraksi dalam satu tatanan kehidupan sosial.*
- ≠ *Individu/kelompok yang memiliki kesamaan kepentingan berinteraksi secara setara berdasarkan tata nilai dan norma-norma yang disepakati bersama dengan negara dan pasar dalam domain (ranah) bersama untuk mengejar kesejahteraan.*
- ≠ *Individu atau kelompok masyarakat selain negara dan pasar yang memiliki kepentingan bersama dan berinteraksi untuk tujuan bersama berdasarkan nilai-nilai demokrasi, kesetaraan dan keadilan.*
- ≠ *Sekelompok warga non militer yang mendiami suatu wilayah, tidak terlibat secara langsung dalam pengambilan kebijakan/keputusan negara dan memiliki kepentingan yang sama untuk diperjuangkan secara bersama yang berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, demokrasi, HAM dan nilai kemanusiaan lainnya.*

? **Region Jawa-Bali dan Region Sulawesi-Papua**

Region ini menggunakan definisi Civicus.

Terlepas dari hasil yang diperoleh, secara umum proses yang terjadi selama penentuan definisi cukup alot dan memakan waktu cukup panjang, seperti penggunaan istilah “arena”. Tawaran istilah definisi Civicus dipandang oleh sebagian peserta region Sumatera dan Jabotabek tidak mencerminkan sebuah subyek yang aktif. Oleh karena itu istilah tersebut diusulkan diubah menjadi “individu” atau “kelompok”.

Perdebatan lain yang umumnya terjadi menyangkut interpretasi definisi Civicus yang cukup luas bagi spektrum kelompok masyarakat untuk digolongkan sebagai masyarakat sipil tanpa perlu terikat oleh nilai-nilai tertentu. Dengan kata lain kelompok masyarakat apapun tanpa perlu dilihat nilai-nilai yang dianutnya selama bukan negara dan pasar, dapat disebut sebagai masyarakat sipil. Padahal penggunaan kata dasar *civil = civilian* itu sendiri berarti masyarakat yang beradab.

Bagi kelompok yang tidak setuju bila definisi masyarakat sipil itu bebas nilai berargumen “masyarakat sipil harus memiliki nilai-nilai demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan serta HAM”. Nilai-nilai tersebutlah yang menjadi pembeda masyarakat sipil dengan non masyarakat sipil. Sementara bagi kelompok yang setuju definisi masyarakat sipil bebas nilai, berargumen bahwa dalam realitasnya banyak masyarakat sipil yang tidak menerapkan nilai-nilai tersebut. Untuk itu jika tidak masuk dalam masyarakat sipil, pasar dan negara, dimana ia berada?

Dalam pembahasan definisi, masing-masing region cenderung melihat pada realitas keragaman organisasi maupun aksi yang dilakukan masyarakat baik yang terorganisir secara permanen maupun *adhoc*. Hal ini menyebabkan proses pendefinisian cenderung merupakan refleksi atas realitas organisasi dan aksi masyarakat sipil untuk ditangkap menjadi definisi yang dibenturkan dengan tawaran definisi Civicus.

1.2 Spektrum

Bahasan mengenai spektrum yang ada dalam masyarakat sipil pada dasarnya mengacu pada definisi yang disepakati di masing-masing region. Meskipun definisi yang dimunculkan suatu region sama dengan region lain, namun bisa memunculkan spektrum masyarakat sipil yang berbeda. Munculnya perbedaan itu tidak terlepas dari komposisi dan latar belakang peserta di masing-masing region itu sendiri. Spektrum yang berhasil disepakati dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1
Spektrum Masyarakat Sipil yang Disepakati di 6 Region

Region	Spektrum Masyarakat Sipil	
Kalimantan	<ul style="list-style-type: none"> ✍ Organisasi etnik ✍ Organisasi agama ✍ Organisasi berbasis sosio-biologis ✍ Organisasi profesi ✍ Koperasi ✍ Gender 	<ul style="list-style-type: none"> ✍ Organisasi pemuda ✍ Organisasi kemahasiswaan ✍ Lembaga swadaya masyarakat ✍ Lembaga akademis ✍ Partai politik
Sumatera	<ul style="list-style-type: none"> ✍ Kelompok tani ✍ Organisasi buruh ✍ Organisasi nelayan ✍ Ornop ✍ Organisasi profesi ✍ Ormas ✍ Organisasi mahasiswa/pelajar ✍ Organisasi etnis 	<ul style="list-style-type: none"> ✍ Kelompok masyarakat adat ✍ Kelompok agamawan ✍ Kelompok miskin kota ✍ Kelompok budayawan
Jabotabek	<ul style="list-style-type: none"> ✍ Kelompok swadaya masyarakat ✍ Organisasi sosial ✍ Organisasi masyarakat ✍ Organisasi profesi ✍ Organisasi keagamaan ✍ Kelompok hobi ✍ Organisasi non pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> ✍ Gerakan sosial ✍ Lembaga kemasyarakatan ✍ <i>Watchdog</i> ✍ Masyarakat adat ✍ Kelompok agama ✍ Kelompok etnis
Nusa Tenggara	<ul style="list-style-type: none"> ✍ LSM/NGO ✍ Kelompok petani ✍ Kelompok buruh ✍ Kelompok nelayan ✍ Kelompok pengrajin ✍ Kelompok profesi ✍ Tokoh/kelompok masyarakat adat ✍ Kelompok pemuda/anak ✍ Pers (organisasi pers) 	<ul style="list-style-type: none"> ✍ Kelompok perempuan ✍ Koperasi/usaha kecil menengah ✍ Organisasi sosial/kemasyarakatan ✍ Parpol ✍ Organisasi hobi ✍ Organisasi sosial politik ✍ Keluarga
Sulawesi-Papua	<ul style="list-style-type: none"> ✍ Kelompok mahasiswa dan organisasi 	<ul style="list-style-type: none"> ✍ Petani

	kepemudaan ✍ Kelompok perguruan tinggi ✍ Kelompok buruh ✍ Kelompok swadaya masyarakat ✍ Kelompok perempuan ✍ Kelompok arisan	✍ Kelompok nelayan ✍ Partai politik ✍ Kelompok preman ✍ Kelompok lesbian, homo dan waria ✍ Kelompok anak jalanan ✍ Kelompok miskin kota
Jawa-Bali	✍ Lembaga akademis ✍ Masyarakat adat ✍ Lembaga swadaya masyarakat ✍ Pers/lembaga pers ✍ Seniman ✍ Organisasi seni/budaya ✍ Serikat pekerja	✍ Organisasi agama ✍ Petani/serikat petani ✍ Organisasi kepemudaan ✍ Organisasi kemasyarakatan ✍ Organisasi miskin kota ✍ Organisasi difabel ✍ Organisasi buruh

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa spektrum di masing-masing region hampir memiliki kesamaan. Hal yang menarik dicermati adalah keberadaan spektrum partai politik dan koperasi. Region Jawa-Bali, Jabotabek dan Sumatera menetapkan bahwa spektrum partai politik digolongkan ke dalam sektor negara. Argumennya yaitu bahwa partai politik masih dianggap berada pada lingkaran negara dan secara terus menerus bertujuan pada ‘perebutan’ kekuasaan. Sementara region Kalimantan, Nusa Tenggara dan Sulawesi-Papua menganggap spektrum partai politik merupakan bagian dari masyarakat sipil mengingat partai politik berbeda dengan institusi negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif).

Demikian pula dengan koperasi, perhimpunan yang terdiri dari orang yang melakukan usaha/kegiatan kolektif ini disepakati oleh region Kalimantan dan Nusa Tenggara dalam kategori masyarakat sipil, mengingat kegiatan koperasi bukan melulu mencari keuntungan, namun lebih kepada kesejahteraan anggota. Sedangkan region yang tidak menyepakati lebih menggarisbawahi koperasi sebagai badan usaha yang mencari keuntungan.

2 PESERTA

Latar belakang, asal organisasi, komposisi serta asal wilayah peserta selama proses pengukuran Indeks Masyarakat Sipil merupakan salah satu faktor penting. Proses penentuan peserta berdasarkan pertimbangan tersebut sangat menentukan hasil mulai dari tingkat penentuan definisi, identifikasi spektrum, penilaian-interpretasi sampai dengan rencana aksi. Penentuan peserta dengan mempertimbangkan semua hal di atas memberikan perbedaan hasil yang sangat signifikan.

Berkaitan dengan hal tersebut contoh yang sering dijumpai adalah pada interpretasi kata “sehat” atau kata “sipil”. Ketika kelompok akademis Kalimantan mendiskusikan metodologi serta komparasi antar indikator, kelompok nelayan region tersebut justru masih menangkap kata sehat dalam artian kesehatan fisik/badan. Demikian pula kecenderungan peserta dari legislatif atau swasta yang penilaiannya cenderung berbeda sangat tajam dengan LSM atau ormas yang memiliki haluan kiri garis keras seperti yang terjadi di region Jabotabek. Hal ini menunjukkan bahwa komposisi dan kuota sangat berpengaruh pada indeks akhir yang dicapai.

Secara umum total peserta yang mengikuti seluruh proses lokakarya di 6 region ini adalah 302 orang (54 perempuan) dan sebagian besar region telah mengakomodasi perwakilan wilayah (propinsi) dan sebaran spektrum yang sebelumnya telah disepakati. Bahkan beberapa wilayah muncul jenis spektrum seperti organisasi hobi (wilayah Sulawesi-Papua) dan organisasi difabel (wilayah Jawa-Bali). Selain itu ada juga peserta yang berasal dari *stakeholder* kunci yang mempengaruhi dan dipengaruhi masyarakat sipil, seperti DPRD, Pemerintah Daerah, TNI, Partai Politik, serta Pengusaha. Keberadaan mereka dalam lokakarya cukup melengkapi komposisi peserta. Distribusi spektrum dapat dilihat di Tabel 2.

Tabel 2
Distribusi Peserta/Responden di 6 region

No	Region	Jawa-Bali	Jabo-tabek	Nusa Tenggara	Sulawesi-Papua	Kalimantan	Sumatera
	Spektrum						
01	Organisasi profesi		x			x	
02	Organisasi pemuda/mahasiswa	x	x			x	
03	Organisasi berbasis etnik					x	
04	Organisasi berbasis agama/tokoh agama	x	x	x		x	
05	Legislatif	x		x	x	x	x
06	Masyarakat adat/tokoh adat/lembaga adat	x		x	x	x	x
07	NGO/LSM	x	x	x	x	x	x
08	Buruh/serikat buruh/serikat pekerja	x	x			x	x
09	Organisasi miskin kota	x	x			x	x
10	Partai politik	x				x	
11	Eksekutif/pemda		x	x	x	x	x
12	Koperasi		x				
13	Nelayan/serikat nelayan		x		x	x	
14	Petani/serikat petani	x		x	x		x
15	Akademisi	x	x	x	x		x
16	Front Pembela Islam (kel. agama)		x				
17	Organisasi berafiliasi pada dunia usaha	x	x	x	x		x
18	Lembaga donor		x				
19	Ormas		x				x
20	Pers/wartawan	x		x	x		x
21	TNI				x		
22	Serikat sopir taksi				x		
23	IKADIN				x		
24	OKP	x					
25	Seniman/budayawan	x					
26	Ormas partai	x					
27	OKP	x					
28	Perempuan		x				
29	Difable (Different able)	x					
	Jumlah :	17	15	9	12	12	11

Seperti terlihat dalam tabel di atas, spektrum peserta yang berpartisipasi dalam pengembangan instrumen Indeks Masyarakat Sipil (IMS) dan sekaligus menjadi responden dalam proses pengukuran IMS tersebut ada 17 jenis OMS/organisasi, baik dari unsur-unsur OMS murni, pemerintah, TNI, Parpol maupun legislatif. Spektrum paling banyak terdapat di region Jawa-Bali (17 spektrum), disusul Jabotabek (15 spektrum) dan paling sedikit adalah region Nusa Tenggara (9 spektrum). Satu-satunya spektrum yang berpartisipasi di

semua region adalah LSM/NGO. Selanjutnya adalah legislatif, masyarakat adat/tokoh adat/lembaga adat dan organisasi yang berafiliasi dengan dunia usaha (berpartisipasi di 5 region). Satu-satunya region yang melibatkan TNI adalah region Sulawesi-Papua. Organisasi yang hanya berpartisipasi di satu regio adalah organisasi berbasis etnik (Kalimantan), koperasi (Jabotabek), Front Pembela Islam (Jabotabek), lembaga donor (Jabotabek), Serikat Sopir Taksi (Sulawesi-Papua), Ikadin (Sulawesi-Papua), OKP (Jawa-Bali), seniman/budayawan (Jawa-Bali), ormas partai (Jawa-Bali), perempuan (Jabotabek) dan difable (Jawa-Bali).

Sedangkan untuk pengukuran indeks di tingkat nasional peserta yang hadir berjumlah 55 orang sebagaimana yang telah disepakati dan dimandatkan di tingkat region.

3 SKALA DAN INDIKATOR

Proses penentuan skor dan indikator di masing-masing region dibangun secara partisipatif. Metoda ini sebenarnya bisa membuka peluang perbedaan dalam penentuan skala untuk menilai indikator dan perbedaan varian indikator serta subdimensi antar region. Hal ini akan menjadi masalah ketika membangun nilai pada tataran nasional. Dengan perbedaan skala serta subdimensi dapat memungkinkan perhitungan indeks nasional tidak dapat diagregasi. Namun, hasil yang diperoleh di masing-masing region menunjukkan kesamaan dalam skala penentuan skor serta kesamaan persepsi atas dimensi yang akan digunakan. Dengan kata lain proses agregasi tidak sampai mengubah metode intan di masing-masing region maupun nasional.

Skala penilaian yang dilakukan terhadap indikator di seluruh region memiliki kesamaan yaitu skor dari 1 sampai 4. Demikian pula dengan makna skor yang diambil, disepakati pada kondisi ideal dan terburuk, untuk skor 4 disepakati merupakan nilai bagi kondisi yang paling ideal (sehat) dan skor 1 menunjukkan kondisi terburuk (sakit). Penggolongan makna skor dan skala yang disepakati dalam lokakarya nasional maupun lokakarya regional bermakna sebagai berikut:

- ? **Sakit (1,00-1,75)** = pernyataan dalam indikator sangat tidak sesuai dengan kenyataan. Realitas menunjukkan situasi yang berkebalikan dengan pernyataan dalam indikator.
- ? **Kurang sehat (1,76-2,50)** = pernyataan dalam indikator kurang sesuai dengan kenyataan, walau ada sebagian kecil situasi yang memang telah terjadi.
- ? **Cukup Sehat (2,51-3,25)** = pernyataan dalam indikator hampir sesuai dengan kenyataan, walau tak sepenuhnya kondisi yang dicita-citakan itu ada (masih ada kelemahan/kekurangan disana-sini).
- ? **Sehat (3,26-4,00)** = pernyataan dalam indikator sesuai dengan kenyataan, memang seperti itulah realitas situasi sekarang.

4 HASIL-HASIL

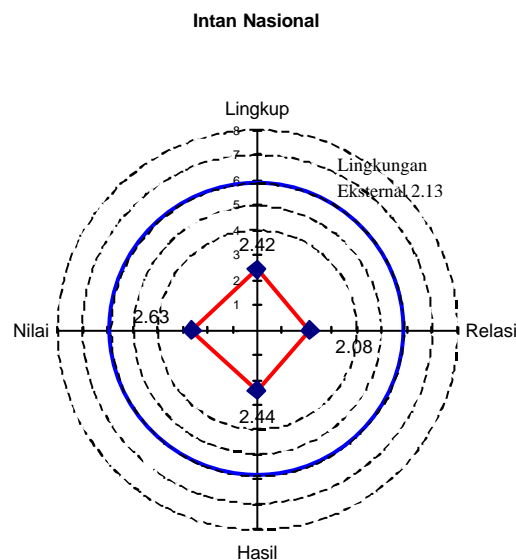
Hasil-hasil yang dicapai dalam pengukuran Indeks Masyarakat Sipil terbagi atas dua. Pertama, hasil yang diperoleh dari pengukuran di 6 region, kedua hasil yang diperoleh berdasarkan penilaian nasional. Pada tingkat regional, hasil yang diperoleh meliputi:

- ? kesepakatan mengenai metode, dimensi dan subdimensi penilaian, dimana kesepakatan ini tidak merubah jumlah dimensi sebagaimana yang ditawarkan Civicus,
- ? kesepakatan atas skala dan makna skala,
- ? kesepakatan atas indikator pada masing-masing dimensi atau subdimensi,
- ? penilaian atas masing-masing indikator,
- ? makna dari penilaian masing-masing dimensi, serta
- ? rencana aksi.

Walau dimulai dengan mengacu indikator-indikator yang ditawarkan Civicus, namun prakteknya indikator yang dihasilkan dari masing-masing region bisa saling berbeda. Baik itu berbeda karena terjadi penambahan jumlah, pengurangan maupun hanya sebatas perbedaan penulisan indikator. Hal ini menjadi permasalahan pada saat sortasi yang dilakukan pada tingkat nasional. Untuk itu pengukuran tingkat nasional menyepakati hanya akan mengangkat satu jenis indikator nasional dari minimal 4 indikator regional yang sama maknanya. Dengan kata lain indikator yang hanya dihasilkan/disepakati pada satu atau dua wilayah, tetap hanya menjadi indikator region tidak dijadikan indikator nasional. Oleh karena itu hasil akhir indeks nasional merupakan suatu agregasi skor indikator-indikator regional yang disepakati.

4.1 Hasil Nasional

Gambaran umum akhir Indeks Masyarakat Sipil yang dihasilkan dapat dilihat dalam gambar berikut.



Gambar 1 Visualisasi intan hasil nasional

Dari gambar di atas, hanya dimensi nilai-nilai masyarakat sipil dengan nilai 2,63 yang menunjukkan kondisi "cukup sehat". Sementara dimensi-dimensi lainnya menunjukkan kondisi yang "agak sakit" seperti yang ditunjukkan oleh dimensi lingkungan eksternal (2,13), dimensi hasil (2,44), dimensi lingkup (2,42), dan dimensi relasi (2,08). Dengan capaian nilai-nilai pada setiap dimensi seperti tersebut diatas, maka nilai rata-rata untuk masyarakat sipil Indonesia adalah 2,34 atau berada dalam kondisi **Kurang Sehat**. Detail mengenai skor indikator nasional pada masing-masing dimensi dapat dilihat pada Lampiran 1.

Dimensi Lingkungan Eksternal

Dimensi lingkungan eksternal terdiri atas 3 subdimensi yaitu:

- ? subdimensi konteks politik,
- ? subdimensi konteks sosial ekonomi, dan
- ? subdimensi konteks hak-hak sipil/kebebasan warga.

Secara umum lingkungan eksternal masyarakat sipil Indonesia saat ini belum mencapai kemajuan berarti, hal itu terlihat dari skor 2,13 yang **kurang sehat**. Beberapa faktor yang menjadi latar belakang kurang sehatnya masyarakat sipil diantaranya:

- ? Partisipasi MS dalam proses-proses politik masih rendah.
- ? Lemahnya penegakan hukum; parpol yang melanggar ketentuan hukum tidak dibubarkan dan masih banyak koruptor-koruptor yang tidak berhasil dijerat hukum.
- ? Produksi hukum yang dikeluarkan belum mencerminkan keadilan.
- ? Kapasitas negara dalam menjalankan fungsi-fungsinya masih lemah.
- ? Pelaksanaan desentralisasi masih setengah hati, hal itu tercermin dengan tidak efektifnya kinerja pemerintah daerah.
- ? Kondisi sosial ekonomi rakyat yang timpang (terjadi kesenjangan yang tajam).
- ? Berbagai sektor dalam kehidupan sosial belum mencerminkan keadilan gender.
- ? Praktek penegakan HAM tidak berjalan sesuai dengan rasa keadilan.

Hal yang menarik dari penilaian dimensi lingkungan eksternal ini adalah adanya kemajuan dalam hal kebebasan warga terutama yang berkenaan dengan kebebasan memperoleh informasi, berkomunikasi, berekspresi, berkumpul dan berorganisasi. Hal itu tergambar dari skor 2,75 sebagaimana yang ditunjukkan pada subdimensi konteks hak-hak sipil/kebebasan warga (Lihat lampiran 1).

Dimensi Lingkup

Dimensi lingkup terdiri atas 4 subdimensi yang mendukungnya yaitu subdimensi tindakan warga negara, organisasi masyarakat sipil, relasi antar OMS serta sumber daya OMS. Dari hasil penilaian skor yang dicapai yaitu 2,42 yang berarti "kurang sehat".

Hal yang menarik dalam dimensi lingkup, yaitu salah satu indikator pada subdimensi Organisasi Masyarakat Sipil yang semula hanya diusulkan satu region (Region Sulawesi-Papua) kemudian menjadi indikator nasional. Indikator tersebut berbunyi penggiat OMS harus menanggalkan jabatan di OMS ketika mereka menjadi pejabat publik. Melalui diskusi panjang indikator ini kemudian disepakati menjadi indikator nasional dengan tetap menggunakan skor dari region Sulawesi-Papua. Argumen dasar yang mendorong

terangkatnya indikator ini karena dianggap masih banyak OMS yang berorientasi hanya untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu saja. Dan itu kian menjadi bias manakala penggiat OMS juga menjadi pejabat publik.

Beberapa hal positif yang ditemukan sehubungan dengan subdimensi tindakan warga diantaranya mulai adanya kebersamaan dan kesetaraan antar warga negara yang diwujudkan dalam tindakan bersama untuk mengatasi persoalan bersama. Selain itu indikasi warga negara menyumbang dan/atau bekerja sukarela dalam kegiatan sosial kemasyarakatan atau menjadi anggota aktif satu perkumpulan masyarakat sipil juga dinilai cukup sehat. Namun demikian lemahnya tindakan warga juga teridentifikasi dari tindakan warga negara dalam mengambil tindakan politis yang masih sedikit.

Sedangkan hal yang berkenaan dengan subdimensi Organisasi Masyarakat Sipil dinilai cukup sehat dengan skor rata-rata 2,60. Indikasi dapat ditunjukkan dengan adanya peningkatan jumlah, jenis dan aktivitas OMS yang mendapat dukungan dari publik dan memberikan pengaruh serta dampak positif terhadap publik. Hal itu juga didukung oleh interaksi dan komunikasi yang terjadi antar penggiat masyarakat sipil, baik melalui kegiatan lokakarya, seminar maupun media *e-mail* dan *web site* yang kian baik. Juga oleh keprihatinan atas isu-isu menyangkut masyarakat sipil serta perkembangan teknologi-informasi yang kondusif. Ibarat pedang bermata ganda, perkembangan teknologi yang kian baik juga kadang merupakan faktor penghambat, terutama akibat kemampuan dalam penguasaan informasi teknologi dikalangan OMS yang rendah.

Problem mendasar diberbagai tataran yang teridentifikasi dari dimensi lingkup diantaranya adalah aksi-aksi warga yang diwujudkan dalam tindakan politis masih sangat terbatas dan bersifat parsial. Sebagai contoh, tuntutan kenaikan upah dan advokasi UU Perburuhan hanya dilakukan oleh kelompok buruh tertentu saja; advokasi terhadap RUU Penyiaran hanya dilakukan oleh organisasi-organisasi yang terkait dengan media dan penyiaran tanpa mendapat dukungan yang berarti dari warga negara.

Warga yang apatis, ketidaktahuan atau minimnya pengetahuan atas hak, trauma-trauma akan represi dan adanya kecurigaan serta prasangka sosial yang tinggi antar warga yang berbeda suku/agama/ras (sektarian) menjadi faktor penyebab internal kondisi ini. Selain itu, pada tataran eksternal tuntutan-tuntutan yang mengemuka sering tidak diakomodasi dalam kebijakan negara dan oleh sektor swasta.

Meskipun jumlah OMS banyak namun keberadaannya tidak tersebar merata. Selain itu jarang bisa terbentuk jaringan OMS yang solid lintas sektor, wilayah dan ideologi. OMS yang besar tidak memandang sebelah mata dan meninggalkan yang kecil serta masih banyak OMS yang belum memiliki jaringan internasional. Trauma (karena pernah dimanfaatkan/digunakan pihak lain), perbedaan yang bersifat ideologis, penguasaan bahasa yang minim dan perbedaan kapasitas seringkali menjadi faktor penyebab kondisi ini.

Faktor lain yang menjadi titik lemah OMS adalah tidak memiliki sumber-sumber finansial yang memadai dan mandiri serta lemahnya kemampuan manajerial dan kemampuan

berkreatifitas dalam menggalang sumber-sumber pendanaan alternatif (selain tergantung pada organisasi donor).

Dimensi Relasi

Bahasan mengenai dimensi relasi tertuju pada empat subdimensi yang terdapat didalamnya yaitu subdimensi kualitas hubungan masyarakat sipil - negara; subdimensi pengaruh masyarakat sipil terhadap pasar; subdimensi pengaruh pasar terhadap masyarakat sipil serta subdimensi keeratatan hubungan masyarakat sipil - negara.

Relasi masyarakat sipil dengan negara dan pasar dilukiskan belum mencapai kemajuan berarti. Hal ini terlihat dari skor 2,08 pada dimensi relasi yang berarti keadaannya kurang sehat. Faktor yang paling mempengaruhi kondisi tersebut adalah dominasi pasar terhadap negara dan masyarakat sipil.

Hal yang menarik dari penilaian dimensi relasi ini, yaitu potensi peningkatan kemandirian masyarakat sipil dari campur tangan negara sehingga masyarakat sipil mampu mendorong keseimbangan posisi tawarnya dengan negara. Hal itu tercermin dengan skor 2,32 pada subdimensi kualitas hubungan masyarakat sipil. Skor ini relatif lebih tinggi dibandingkan dengan skor subdimensi lainnya.

Hal mendasar yang dihadapi dimensi relasi adalah rendahnya tanggung jawab sosial pasar terhadap masyarakat sipil. Hal itu terlihat dengan skor 1,85 pada subdimensi pengaruh pasar terhadap masyarakat sipil.

Dimensi Nilai

Dimensi nilai terdiri atas lima subdimensi yaitu subdimensi semangat kebersamaan; subdimensi demokrasi dan partisipasi; subdimensi HAM dan anti kekerasan; subdimensi keadilan sosial, kesetaraan, dan kesinambungan serta subdimensi kearifan lokal.

Nilai-nilai yang dianut masyarakat sipil memiliki potensi menggembirakan. Hal itu juga terlihat dari skor rata-rata dimensi nilai, yaitu 2,63 yang artinya cukup sehat. Nilai-nilai tersebut diantaranya didukung dari penilaian atas subdimensi semangat kebersamaan (2,70), subdimensi demokrasi dan partisipasi (2,70), subdimensi HAM dan anti kekerasan (2,80), subdimensi kesetaraan sosial, kesetaraan dan kesinambungan (2,60) serta subdimensi kearifan lokal (2,36). Nampak jelas bahwa skor terendah adalah kearifan lokal yang masih menunjukkan kurang sehat.

Sejauh ini keberhasilan-keberhasilan yang dicapai oleh masyarakat sipil berkaitan dengan dimensi nilai meliputi:

- ? Adanya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kebersamaan yang telah menjadi kultur masyarakat ditunjang oleh kemajuan teknologi dan informasi, dan perubahan paradigma politik masyarakat sipil.
- ? Adanya pemahaman yang memadai terhadap nilai-nilai demokrasi dan makin banyaknya OMS yang memiliki komitmen untuk mendorong proses demokratisasi, karena masyarakat sipil percaya bahwa demokrasi adalah cara untuk mencapai kesejahteraan bersama.
- ? Prinsip-prinsip HAM mulai menyebar luas ditunjang dengan makin meningkatnya

kesadaran akan dampak negatif pelanggaran HAM. Selain itu negara (melalui Komnas HAM) telah memberi ruang pada masyarakat sipil melalui ratifikasi UU tentang HAM.

- ? Semangat solidaritas warga negara atas pemahaman kesetaraan gender, keadilan sosial serta pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan mulai bangkit. Dimana isu-isu tersebut telah menjadi isu-isu internasional.

Namun demikian, masih ada problem-problem mendasar yang dihadapi masyarakat sipil diantaranya warga negara dianggap masih kurang peduli terhadap hak dan kewajibannya; munculnya elit-elit yang hipokrit; masih kurang dan belum maksimalnya peran warga negara untuk melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi; eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam (SDA) oleh negara dan pasar yang sangat dominan; kultur patriarki yang masih kuat dan melahirkan subordinasi perempuan; implementasi otonomi daerah belum efektif; serta pengaruh budaya global. Sementara di tingkat eksternal problem juga muncul berkenaan dengan kekuasaan yang hegemonik dan fragmentasi ideologis.

Dimensi Hasil

Dimensi hasil melingkupi empat subdimensi yaitu subdimensi advokasi dan pemantauan, subdimensi penyebaran informasi atau pendidikan kepada warga negara, subdimensi pemberdayaan warga serta subdimensi kesejahteraan sosial.

Penilaian atas dimensi hasil belum cukup menggembirakan. Hal ini tercermin dalam skor rata-rata yang dicapai yaitu 2,44 yang berarti kurang sehat. Faktor-faktor yang mempengaruhi penilaian tersebut adalah:

- ? Rendahnya keterlibatan dan posisi tawar MS dalam proses pengambilan keputusan sehingga usaha-usaha yang dilakukan dalam upaya melindungi kepentingan masyarakat sipil kurang berhasil.
- ? Masyarakat sipil kurang mampu menjangkau kelompok-kelompok sosial yang terpinggirkan.
- ? Kondisi masyarakat sipil yang kurang terorganisir dalam menetapkan pendidikan publik sebagai tujuan organisasi dan/atau terlibat dalam kegiatan pendidikan publik serta tidak didukung sumber daya yang cukup.
- ? Masyarakat sipil tidak berfungsi secara efektif dalam upaya peningkatan kesadaran kelompok masyarakat yang terpinggirkan.
- ? Masyarakat sipil kurang mandiri dalam meningkatkan kapasitasnya.
- ? Masyarakat sipil kurang mampu memberikan kontribusi efektif dalam menjawab persoalan-persoalan kesejahteraan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar warga yang layak, terkait pembagian kerja dengan negara dan pasar.

Terlepas dari kekurangan tersebut diatas ada beberapa hal yang menggembirakan yang dicapai diantaranya:

- ? Masyarakat sipil berperan proaktif dan efektif dalam mempengaruhi kebijakan publik dan mendesak terwujudnya akuntabilitas pemerintah. Hal ini tercermin dalam skor yang dicapai, 2,69 (cukup sehat).
- ? Peran masyarakat sipil dalam penyebaran informasi untuk mendidik publik, tercermin dalam skor 2,66 (cukup sehat).

- ? Masyarakat sipil cukup tanggap dalam memperjuangkan kepentingan kelompok yang terpinggirkan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, yang tercermin dengan skor 2,69 (cukup sehat).

Agenda Aksi

Berkaca dari hasil Indeks Masyarakat Sipil untuk tingkat nasional, sekiranya berhasil disarikan beberapa tindakan aksi yang perlu segera dilakukan guna mendorong terwujudnya ‘kesehatan’ masyarakat sipil. Beberapa agenda aksi yang diusulkan diantaranya yaitu:

- ? **Pendidikan** dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran kritis warga negara akan hak dan kewajibannya agar berfungsi efektif dalam mempengaruhi kebijakan publik serta meningkatkan pengetahuan masyarakat sipil. Pendidikan yang dimaksud mencakup tentang hal-hal yang berkenaan dengan demokratisasi, politik, partisipasi, HAM, kesetaraan gender, lingkungan hidup, kearifan lokal serta isu-isu difable.
- ? **Advokasi**, baik tentang hak-hak OMS maupun analisis kebijakan dengan tujuan untuk menguatkan posisi tawar masyarakat sipil.
- ? **Pengorganisasian** di tingkat basis dan penguatan Organisasi Masyarakat sipil (OMS) yang lebih ditujukan untuk membangun hubungan dan komunikasi antar OMS serta membangun jaringan OMS atau memperkuat jaringan OMS yang sudah ada.
- ? **Kampanye** hak-hak masyarakat sipil.
- ? Membangun **pasar alternatif** dengan tujuan memperkuat posisi masyarakat sipil
- ? **Lobi**, baik kepada pemerintah maupun sektor swasta dalam upaya untuk memperkuat sumber daya OMS terutama untuk sektor informal.
- ? **Pengawasan** terhadap kinerja negara.

4.2 Hasil-Hasil Regional

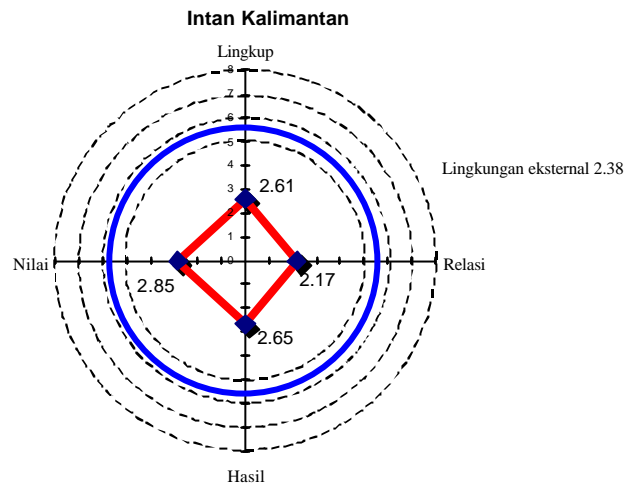
Seperti disebutkan sebelumnya, rangkaian pengukuran Indeks Masyarakat Sipil diawali dengan pengukuran yang dilakukan di 6 region yaitu region Kalimantan, Sumatera, Jabotabek, Nusa Tenggara, Sulawesi-Papua dan Jawa-Bali. Hasil tingkat nasional merupakan hasil elaborasi dari hasil yang diperoleh di tingkat region. Berikut ini adalah hasil-hasil yang diperoleh ditingkat region.

4.2.1 Region Kalimantan

Dari lima dimensi yang diukur diperoleh skor rata-rata adalah 2,53 dengan kategori cukup sehat. Nilai tertinggi diperoleh dimensi nilai (2,85) disusul dimensi hasil (2,65), dimensi lingkup (2,61) dan dimensi lingkungan eksternal (2,37). Sementara nilai terendah ada pada dimensi relasi dengan skor 2,17.

Secara umum skor tersebut juga menunjukkan semakin terinternalisasinya nilai-nilai perjuangan seperti semangat kebersamaan, demokrasi dan partisipasi, HAM dan anti kekerasan serta nilai-nilai keadilan sosial, kesetaraan dan kesinambungan. Apa yang telah dilakukan OMS selama ini mendapatkan hasil yang cukup signifikan terutama dalam pendidikan/informasi kepada warga negara, pemberdayaan warga serta advokasi dan pemantauan. Namun demikian perjuangan dan usaha OMS masih belum mengarah pada peningkatan kesejahteraan sosial.

Berikut hasil penilaian yang divisualisasi dalam bentuk intan. Detail hasil pengukuran pada masing-masing indikator region Kalimantan dapat dilihat pada lampiran 2A.



Gambar 2 Visualisasi intan hasil region Kalimantan

Interpretasi dan penjelasan ringkas dari intan di atas adalah sebagai berikut.

Dimensi Lingkungan Eksternal

Secara umum dimensi lingkungan eksternal menunjukkan kondisi kurang sehat dengan skor 2,38. Skor tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Kalimantan cenderung jarang dilibatkan secara aktif dalam proses politik. Subdimensi konteks politik dengan skor 2,24 menggambarkan bahwa negara belum dapat menjalankan fungsi dan tugasnya kecuali dalam hal pengadaan sistem perpajakan dan penerapan kebijakan publik. Pelaksanaan otonomi daerah belum maksimal sementara penegakan dan supremasi hukum juga masih sangat kacau.

Subdimensi konteks sosial ekonomi memiliki skor 2,16 yang menggambarkan kebijakan pemerintah masih tidak berpihak kepada masyarakat sipil. Sedangkan subdimensi konteks hak-hak sipil/kebebasan warga dengan skor 2,71 sebenarnya sudah cukup sehat tetapi arogansi pemerintah lokal terhadap masyarakat dirasakan masih cukup kuat. Belum lagi tingkat kesadaran masyarakat dan aparat yang masih kurang mendukung.

Dari uraian ringkas interpretasi di atas dapat direfleksikan realitas yang melatarbelakangi hasil penilaian tersebut. Berikut beberapa realitas yang dapat dijelaskan:

- ? Pada bidang politik, masyarakat masih merasa jarang dilibatkan secara aktif dalam proses-proses politik.
- ? Dari segi hukum dan pemerintahan, merupakan rahasia umum bahwa penegakan supremasi hukum masih teramat rendah. Hal itu dirasa sebagai akibat negara belum sepenuhnya menjalankan fungsi dan tugasnya. Negara dinilai sibuk hanya pada hal-hal yang bersifat menguntungkan sebagian pihak. Sementara pelaksanaan otonomi

daerah yang menjadi tema nasional baru sebatas pengertian dan perdebatan, belum sampai titik pelaksanaan yang berpihak masyarakat.

- ? Fakta lain adalah kondisi sosial ekonomi masyarakat Kalimantan yang masih timpang dan belum sepenuhnya lepas dari krisis moneter.
- ? Kebebasan warga dan jaminan hak-hak sipil sebenarnya sudah cukup baik walau dalam kenyataannya pelanggaran HAM masih terjadi.

Dimensi Lingkup

Interpretasi terhadap penilaian lingkup dengan skor 2,61 menggambarkan masyarakat berada pada kondisi cukup sehat dalam melakukan kegiatan sosial kemasyarakatan.

Beberapa realitas yang mendasari hasil penilaian dimensi ini diantaranya:

- ? Partisipasi aktif masyarakat dirasa sangat baik, walau terkadang masih ditemui kekurangan-kekurangan dalam membangun kebersamaan ataupun melakukan aksi bersama untuk kepentingannya.
- ? Jumlah dan jenis OMS di Kalimantan dinilai sudah cukup banyak dan beragam walau masih belum tersebar sampai wilayah-wilayah yang terpencil.
- ? Terdapat jaringan OMS yang cukup kuat antara organisasi akar rumput dengan organisasi yang lebih besar sehingga komunikasi, informasi dan aliansi berjalan cukup aktif dan efisien, walau jaringan itu sendiri masih belum tersebar keseluruh sektor.
- ? Selain mampu menarik dan mempertahankan personil yang dibutuhkan, sebagian OMS di Kalimantan juga merasa cukup mampu menggunakan teknologi dalam mengakses dan mengelola informasi-komunikasi, meskipun dari sisi pendanaan masih belum aman, ketergantungan pada satu lembaga donor masih cukup tinggi .

Dimensi Nilai

Semangat kebersamaan yang tercipta antara para penggiat maupun masyarakat sipil dalam tataran cukup sehat (2.69). Hal tersebut juga didukung dengan tingkat partisipasi dan kesadaran demokrasi masyarakat sipil yang kian meningkat ditandai dengan skor 2.82. Sebagai imbas dari kedua hal tersebut maka hal positif adalah kesadaran masyarakat sipil mendukung HAM dan anti kekerasan sebagai tujuan hakiki dari prinsip demokrasi, pada subdimensi ini didapatkan nilai yang sangat tinggi yaitu 3.02. Pada tingkat keadilan sosial, kesetaraan, dan kesinambungan mendapat penilaian yang cukup baik, hal ini karena cara pandang kita pada keadilan, isu lingkungan, kesetaraan gender, kesadaran akan sumber daya adalah faktor-faktor penentu nilai-nilai kesehatan masyarakat sipil.

Realitas yang mendasari penilaian yang sempat dielaborasi dalam lokakarya regional di Kalimantan:

- ? Masih terjadi perdebatan dalam mencari solusi terbaik diantara penggiat masyarakat sipil meskipun perdebatan itu tidak sampai menjadi permasalahan dan juga hubungan masyarakat antar sipil masih harmonis, hal ini ditandai adanya kesadaran untuk berkarya dan semangat saling membantu untuk kebajikan bersama.
- ? Ada nuansa demokratis dalam OMS yang tergambar pada cara pemilihan pemimpin, bentuk atau sistem manajemen, proses pengambilan keputusan dan kegiatan yang melibatkan anggota dan *stakeholder*, serta pasal-pasal pengaturan diri sendiri/internal organisasi. Hal ini didukung oleh realitas penggiat masyarakat sipil percaya dan

melaksanakan nilai-nilai demokrasi tersebut, juga warga negara mendukung prinsip-prinsip demokrasi dan mempunyai kepedulian mendalam terhadap kewajibannya.

- ? OMS dan masyarakat sipil mengecam dengan tegas setiap pelanggaran HAM atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat dan negara. Oleh karena itu mereka pro-aktif mencegah kekerasan dan mendukung inisiatif resolusi atau penyelesaian konflik tanpa kekerasan sehingga diperlukan adanya kesepakatan antara penggiat masyarakat sipil dan warga negara mengenai prinsip-prinsip HAM dan anti kekerasan.
- ? Kesepakatan antara penggiat masyarakat sipil mengenai pentingnya keadilan sosial, penggunaan sumber daya yang berkelanjutan, menentang bias gender, penghapusan kemiskinan, juga diikuti adanya kesadaran tinggi dan kesediaan masyarakat sipil dalam bertindak untuk isu-isu dimaksud diatas--kecuali dalam isu lingkungan-- secara berkelanjutan didalam tindakan aksi disekitar lingkungannya.

Dimensi Relasi

Interpretasi terhadap hasil penilaian relasi (2,17) menggambarkan negara dan pasar masih memandang masyarakat sipil sebagai subyek bukan mitra sehingga kualitas hubungan negara dengan masyarakat sipil buruk dan tidak erat. Demikian pula dengan pengaruh masyarakat sipil terhadap pasar dan sebaliknya.

Realitas yang mendasari penilaian yang sempat dielaborasi diantaranya:

- ? Perbedaan pendapat yang berbeda-beda belum diterima oleh negara sepenuhnya, sementara aturan untuk keterlibatan OMS belum sepenuhnya terakomodir.
- ? Sering terjadi interaksi antara OMS dan aparat negara yang melibatkan kalangan luas dan mencakup berbagai bentuk interaksi dengan beraneka isu namun penggiat masyarakat sipil dan aparat negara belum mempunyai sistem pertukaran informasi, komunikasi dan konsultasi yang tepat, negara juga belum secara aktif mendukung OMS.
- ? Masyarakat sipil kurang memainkan peran penting dalam monitoring kegiatan, dampak pasar, transparansi dan akuntabilitas perusahaan serta kurang mempengaruhi para pengusaha swasta lewat tindakan-tindakan seperti dialog, *lobby*, pendampingan masyarakat dan boikot.

Namun demikian juga disadari bahwa sudah muncul usaha bersama-sama antar sektor swasta dan publik dalam memperjuangkan isu-isu sosial/ekonomi/lingkungan atau menyelesaikan isu-isu yang berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas perusahaan, baik karena inisiatif independen maupun tekanan dari luar. Disadari juga pertanggungjawaban sektor usaha belum terbentuk dengan baik dan belum menjadi sumber yang dinamis untuk organisasi masyarakat sipil.

Dimensi Hasil

Penggiat masyarakat sipil di Kalimantan dinilai sudah proaktif dalam mempengaruhi kebijakan publik, melakukan pemantauan kinerja pemerintah dan menentang pelanggaran atas hak anggota masyarakat tetapi belum dapat berperan efektif dan belum berpartisipasi maupun terlibat dalam pengambilan keputusan serta belum berhasil mendesakkan kepentingan-kepentingan mereka dalam agenda-agenda kebijakan publik. Organisasi Masyarakat Sipil di Kalimantan juga sudah efektif dalam memberikan informasi dan

bersinergi untuk mendidik publik mengenai isu-isu utama baik sosial, politik, ekonomi yang lebih luas tetapi belum berhasil menjangkau kelompok sosial yang terpinggirkan.

Selain itu OMS di Kalimantan juga mampu dan tanggap akan kepentingan-kepentingan utama dan memusatkan perhatian pada kesetaraan hak sosial, ekonomi, politik dan hukum dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada tetapi masih sedikit kelompok-kelompok pinggiran yang mempunyai wadah atau organisasi tempat mereka memperjuangkan hak-haknya. Walau kadang masih dirasa belum banyak terlibat debat publik atau memenuhi perannya secara tepat dalam pembagian kerja antara negara, pasar dan masyarakat sipil.

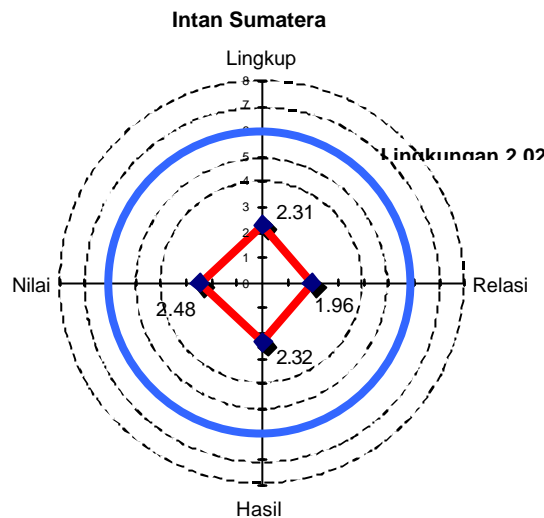
4.2.2 *Region Sumatera*

Hasil akhir intan menunjukkan gejala yang relatif kurang memuaskan bagi gerakan masyarakat sipil di wilayah Sumatera. Akan tetapi hasil intan itu juga menunjukkan adanya hal-hal yang baik bagi gerakan masyarakat sipil. Hasil intan setidaknya mampu menjadi titik tolak bagi langkah untuk meningkatkan kualitas masyarakat sipil itu sendiri ke depan.

Bentuk intan menghasilkan pola yang tidak simetris. Pola itu menggambarkan adanya inkonsistensi di mana pada suatu aspek dalam dimensi skornya tinggi tetapi pada aspek lainnya yang berhubungan, ternyata skornya rendah. Untuk lebih jelasnya tentang pengaruh hubungan antar dimensi diperlukan teknik analisis secara simultan.

Dari kelima dimensi yang dikembangkan, keadaan pada dimensi lingkungan dan relasi merupakan yang terendah. Skor yang rendah pada kedua dimensi tersebut menunjukkan bahwa lingkungan eksternal dan relasi antara masyarakat sipil dengan negara dan pasar menjadi titik lemah gerakan masyarakat sipil. Atau dengan kata lain -jika dipilah secara eksternal masyarakat sipil relatif lemah. Pada sisi lainnya secara internal, masyarakat sipil memiliki suatu potensi untuk semakin meningkatkan kesehatannya.

Karena kita tidak mempunyai angka yang pasti tentang besaran pengaruh, kecuali dalam bentuk proporsi berdasarkan kriteria indeks, maka analisis intan hanya akan bersifat kualitatif yang merupakan interpretasi terhadap kondisi makro. Berikut hasil penilaian yang dilakukan di Sumatera, detail atas penilaian masing-masing indikator dapat dilihat pada lampiran 2B.



Gambar 3 Visualisasi intan hasil region Sumatera

Secara keseluruhan interpretasi intan dalam konteks makro merupakan problem mendasar yang dihadapi pada setiap subdimensi adalah sebagai berikut:

Dimensi Lingkungan Eksternal

Hasil skoring untuk dimensi ini rata-rata adalah 2,02. Skor terendah adalah pada subdimensi konteks politik sebesar 1,86. Kondisi sosial ekonomi juga sangat rendah sebesar 1,92 yang cukup tepat menggambarkan kondisi perekonomian yang masih belum pulih. Seiring dengan iklim reformasi sekarang, skor tertinggi untuk dimensi ini adalah pada subdimensi hak-hak sipil/kebebasan warga sebesar 2,27. Perlu diingat angka ini adalah gambaran kurang sehat (agak sakit), artinya hak-hak sipil yang menguat baru sebatas pada hak berserikat dan mengeluarkan pendapat dan belum pada hak-hak asasi lainnya.

Dimensi Lingkup

Hasil skoring untuk dimensi ini rata-rata adalah 2,31. Skor terendah adalah pada subdimensi sumber daya OMS sebesar 2,11 yang menunjukkan bahwa kapasitas masyarakat sipil berhadapan dengan negara dan pasar terhambat oleh faktor ini. Kondisi relasi antar OMS juga cukup rendah sebesar 2,26.

Skor rata-rata itu menunjukkan bahwa antar komponen OMS memang berbeda dalam metode, keyakinan dan kepentingan serta juga karena batasan OMS masih relatif kabur. Barangkali hanya relasi antar ornop yang memang cukup kuat dan dapat dilihat dari pengisian indeks dengan nilai tiga untuk subdimensi ini. Skor tertinggi ada pada subdimensi OMS sebesar 253 yang menunjukkan gambaran mendekati agak sehat. Pada dimensi lingkup ini subdimensi tindakan warga negara juga menunjukkan ke arah yang agak sehat.

Dimensi Relasi

Dalam kaitannya dengan kualitas Hubungan Masyarakat Sipil - Negara region ini menilai bahwa negara masih melakukan hegemoni dan kooptasi terhadap masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Selain itu juga masih belum ada ruang interaksi antara masyarakat sipil dengan negara yang seimbang.

Sementara dalam kaitannya dengan tingkat keeratan hubungan antara masyarakat Sipil - Negara dirasa masih ada kecurigaan oleh negara terhadap kerja-kerja organisasi yang dilakukan oleh masyarakat sipil. Demikian juga dalam komunikasi masih belum terbangun baik antara masyarakat sipil dengan negara.

Sedangkan dalam kaitannya dengan pengaruh masyarakat terhadap pasar dirasa masih lemah kontrol masyarakat, disisi lain pengaruh pasar terhadap masyarakat sipil tidak seimbang serta eksploitatif dan menganut etatisme .

Dimensi Nilai

Telah ada OMS yang bekerja untuk kebijakan yang sama namun belum membangun hubungan timbal balik yang berlandaskan kepercayaan. Ditambah dengan masih minimalnya perdebatan sesama penggiat masyarakat sipil mengenai bagaimana cara terbaik untuk mencapai kebijakan bersama.

OMS dan para penggiat masyarakat sipil telah menyadari prinsip dan nilai-nilai demokrasi walaupun sebagian warga negara belum melaksanakan prinsip-prinsip tersebut dan belum pula mempunyai rasa kepedulian yang mendalam pada kewajiban.

Masyarakat sipil proaktif menolak dan mengecam setiap bentuk kekerasan serta pelanggaran HAM terhadap masyarakat serta mendukung inisiatif resolusi konflik tanpa kekerasan, walaupun minimnya komitmen antara penggiat OMS dan warga negara lainnya.

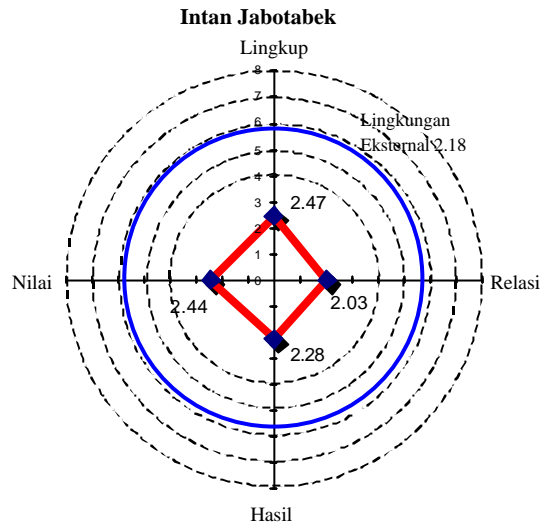
Meskipun penggiat MS telah berupaya mendorong dalam memajukan kesadaran lingkungan dan pengguna sumber daya berkelanjutan namun belum ditindaklanjuti dalam bentuk koalisi lintas sektor yang menentang bias gender dan ketidakadilan sosial.

Dimensi Hasil

Secara umum skor rata-rata dimensi hasil antara 2 sampai 3, nilai yang menunjukkan arah yang cukup sehat. Subdimensi pemberdayaan warga dan pendidikan warga angkanya relatif tinggi yang berarti penggiat masyarakat sipil cukup banyak melakukan program ini. Akan tetapi dalam pertanyaan mengenai keterlibatan dalam pengambilan keputusan serta penyusunan agenda publik skornya sangat rendah sebesar 1,87. Skor yang rendah tersebut disebabkan oleh kuatnya hegemoni pemerintah dan modal terhadap rakyat dan masih lemahnya sumberdaya penggiat masyarakat sipil dan rakyat dalam mempengaruhi keputusan publik.

4.2.3 Region Jabotabek

Secara umum kondisi masyarakat sipil di Jabotabek menunjukkan skor 2,28 yang berarti kurang sehat, hasil pada masing masing dimensi dapat dilihat sebagai berikut: (detail skor pada masing-masing indikator dapat dilihat dalam lampiran 2C)



Gambar 4 Visualisasi intan hasil region Jabotabek

Dimensi Lingkungan Eksternal

Dimensi lingkungan eksternal dengan skor 2,18 diinterpretasikan sebagai suatu keadaan yang kurang sehat. Realitas menunjukkan bahwa partisipasi, penegakan hukum, dan kapasitas negara dalam kondisi sakit. Sementara itu masih banyak kasus kemiskinan dan ketimpangan sosial di masyarakat yang memicu banyaknya konflik dan mengancam keamanan masyarakat. Di pihak lain negara dinilai dalam kondisi sakit yang turut mendorong masyarakat sakit, hal itu dibuktikan dengan kenyataan bahwa tidak ada ruang berpendapat, banyaknya pelanggaran HAM serta media kurang independen. Hal yang lebih tragis ada lah OMS cukup banyak mengalami intimidasi, teror dan perlakuan sewenang-wenang dari negara

Realitas tersebut sebenarnya didorong oleh problem mendasar diantaranya:

- ? Rakyat tidak berdaulat/berkuasa atas jalannya negara dimana sistem tidak berubah dan tidak membangun kedaulatan rakyat.
- ? Sistem hukum yang tidak sehat sehingga hukum tidak dapat ditegakkan.
- ? Negara tidak berfungsi bagi kepentingan rakyat, tidak adil dan tetap menjadi 'sarang' korupsi.
- ? Semua kebijakan dibidang sosial-ekonomi tidak berpihak kepada masyarakat sipil tetapi lebih mengabdikan pada kepentingan kekuatan modal (pasar) dan menciptakan sistem kondusif terjadinya KKN.

Dimensi Lingkup

Penilaian dimensi lingkup memperoleh skor 2,47 yang masuk kategori kurang sehat. Beberapa realitas yang mendasarinya seperti tindakan warga negara masih dianggap kurang responsif, selain itu OMS juga masih banyak yang tidak berhubungan langsung dengan masyarakat bahkan terkadang masih terlalu memikirkan kepentingan proyek atau mungkin dibentuk atas kepentingan proyek.

Di lain sisi relasi antar OMS juga belum dianggap padu dan harmonis, OMS terkadang hanya menaruh perhatian pada isu-isu tertentu dalam melakukan aliansi ataupun kelompok *pressure*. Hal itu wajar mengingat fakta atas kondisi OMS yang juga tidak mandiri dan tidak memiliki sistem rekrutmen, khususnya yang berkenaan dengan pengembangan organisasi.

Dari fakta tersebut dapat ditarik beberapa problem mendasar. Pertama dari sisi OMS, adanya ketidakmandirian OMS akibat sifat egoisme dan eksklusivisme. Hal ini menjadi penting sebagai catatan untuk pembenahan ke depan. Kedua, dari sisi masyarakat juga mulai menguak dan berkembang stereotip dan prasangka sosial yang sifatnya kurang mendukung. Hal itu mengakibatkan kurangnya rasa kebersamaan diantara masyarakat, kebersamaan hanya muncul dalam masyarakat ketika kondisi mendesak saja.

Dimensi Hasil

Dimensi hasil menunjukkan skor 2,28 yang berarti kurang sehat. Pada konteks ini juga dapat dimaknakan bahwa dominasi negara dan permainan pasar masih sangat besar terhadap masyarakat. Contoh hal yang paling mudah dilihat adalah proses advokasi dan pemantauan. Dominasi negara dirasa turut mempengaruhi kemampuan OMS dalam upayanya untuk terlibat dalam pembuatan kebijakan publik. Akibatnya, OMS terkesan kurang efektif terlibat dalam proses-proses pembuatan kebijakan. Hal itu juga ditunjang dengan hal yang berkenaan dengan pendidikan/informasi yang dirasa masih sangat minim. Bahkan faktor pendidikan juga diyakini sama sekali tidak menjangkau wilayah-wilayah yang terpencil.

Dari sisi kesejahteraan sosial, selain OMS masih dirasa kurang mampu berperan dalam pembagian kerja antara negara dan pasar, OMS juga masih dianggap kurang dalam melakukan tekanan pada negara untuk menyediakan kebutuhan dasar warga.

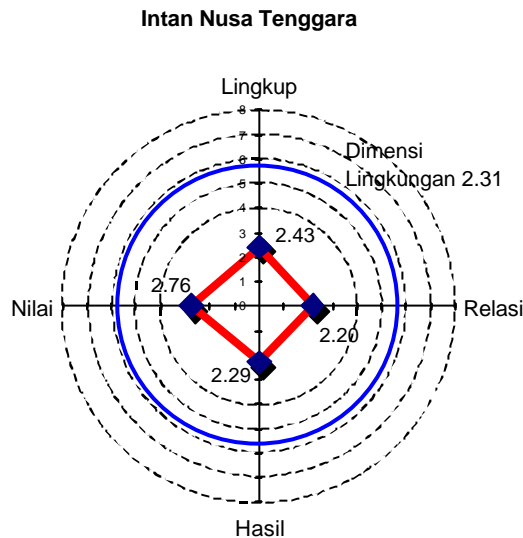
Dari beberapa realitas tersebut beberapa problem dasar yang berhasil dielaborasi diantaranya yaitu:

- ? Masih terdapat sistem terstruktur dalam negara yang sengaja membuat rakyat tidak berdaya, di mana negara masih melakukan dominasi sehingga OMS tidak berdaya.
- ? OMS masih belum berpengalaman dalam melakukan advokasi dan pemantauan. Hal itu ditunjang diantaranya oleh kekurangmampuan OMS dalam berkomunikasi ataupun kekurangmampuan OMS dalam menerjemahkan isu-isu sosial, politik, dan ekonomi ke dalam bahasa yang mudah dimengerti masyarakat.
- ? OMS kurang sabar dan cepat bosan dalam mendampingi masyarakat yang terpinggirkan.
- ? MS kurang memahami kebutuhan masyarakat terpinggirkan.
- ? Peran negara dan pasar yang terlalu dominan dan kurang memperhatikan nasib rakyat.

- ? Peran MS yang masih kecil dalam pembagian kerja.
- ? MS kurang memiliki sumber daya untuk merespon keadaan masyarakat.

4.2.4 Region Nusa Tenggara

Secara umum kondisi masyarakat sipil di Nusa Tenggara menunjukkan skor 2,40 yang berarti kurang sehat, hasil pada masing-masing dimensi dapat dilihat sebagai berikut: (detail skor pada masing-masing indikator dapat dilihat dalam lampiran 2D)



Gambar 5 Visualisasi intan hasil region Nusa Tenggara

Dimensi Lingkup

Skor 2,43 dimensi lingkup pada dasarnya menunjukkan kondisi yang kurang sehat. Walau realitas atas budaya/nilai-nilai kebersamaan masyarakat Nusa Tenggara yang positif turut mendukung dimensi ini namun banyak pula hal yang turut melemahkannya. Contohnya relasi antar OMS dan sumber daya OMS yang merupakan hambatan dalam penilaian dimensi ini sehingga rasanya Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) perlu mengevaluasi metode pendekatan dan aktivitasnya. Hal itu dilaksanakan baik dari sisi internal dengan melakukan pembenahan, juga di sisi eksternal melakukan pembenahan dalam membangun relasi antar sesama OMS sehingga segala sesuatu yang dilakukannya menjadi kolektif dan memanfaatkan sumber daya yang optimal.

Dimensi Hasil

Hasil-hasil yang dicapai masyarakat sipil sebagaimana tergambar dalam indeks (2,29) menunjukkan kondisinya yang belum optimal (kurang sehat). Walau sudah ada keterlibatan masyarakat sipil dalam proses-proses kerja OMS namun tetap saja kondisinya masih lemah (kurang diperhitungkan). Hal itu juga diakibatkan oleh aksi-aksi yang dilakukan OMS yang terkadang hanya berkuat pada advokasi sementara penyebaran informasi yang banyak mendorong pengembangan dan kemandirian dalam masyarakat masih kurang. Disamping

itu, proses pemberdayaan ekonomi oleh OMS yang seharusnya berperan dalam membangun kesejahteraan masyarakat tidak mendapat dukungan yang berarti dari negara maupun pasar.

Dimensi Nilai

Skor dimensi nilai-nilai dalam masyarakat sipil relatif lebih tinggi (2,76) atau cukup sehat dibandingkan dimensi lain. Walau demikian masih ada problem-problem untuk mencapai kondisi ideal, misalnya hal yang berkenaan dengan kerja-kerja bersama. Untuk itu upaya prioritas yang dilakukan adalah membentuk dan memaksimalkan koalisi lintas sektor dalam masyarakat sipil maupun dengan lingkungan eksternal.

Realitas lain yang patut diperhatikan untuk perbaikan ke depan yaitu penggunaan alat dalam seremonial kultur. Budaya ini memang telah lahir dan berkembang sejak lama namun kadang budaya ini perlu untuk dikembangkan kembali guna mengeliminir akibat buruk (misal: cedera) yang mungkin ditimbulkan.

Dimensi Relasi

Skor 2,20 yang ditunjukkan pada dimensi ini masuk pada kategori kurang sehat. Pada tatanan keeratan hubungan MS - negara, realitas menunjukkan bahwa ruang publik untuk MS membangun relasi sudah mulai dibuka, keadaan ini sangat berbeda dengan masa orba. Hal ini terlihat dengan makin tingginya intensitas partisipasi/peran OMS di pentas publik, baik itu melalui demonstrasi, aksi-aksi damai, dialog, lobi, seminar, dan lain-lain. Hal menonjol yang bisa dilihat adalah tumbuhnya berbagai jenis OMS sampai ke pelosok-pelosok desa seperti masyarakat adat, organisasi tani, *credit union*, UBSP, dan lain-lain. Meskipun demikian relasi ini belum seimbang karena tekanan negara terhadap MS masih terlalu kuat. Selain itu kondisi ini juga disebabkan oleh pendekatan kekuasaan yang diterapkan negara terhadap MS, masih adanya sekat-sekat negara yang membatasi relasi, kurang tanggapnya pemerintah terhadap isu-isu MS, serta masih terbatasnya dukungan negara terhadap OMS.

Realitas di Nusa Tenggara menggambarkan MS dengan keterbatasan dan kepasrahannya belum bisa berperan secara optimal dalam menciptakan iklim transparansi maupun akuntabilitas pasar. Kemampuan monitoring dan evaluasi dampak pasar pun masih rendah. Dengan demikian meskipun sebagian kecil OMS berhasil mempengaruhi pelaku pasar untuk berpihak terhadap HAM, gender, penghapusan kemiskinan atau perlindungan lingkungan, namun hasilnya belum berpengaruh signifikan terhadap 'kesehatan' relasi mereka dengan pasar. Kondisi ini diperkuat dengan koalisi besar negara - pasar untuk menindas MS. Hal ini bisa terlihat dari banyaknya UU/kebijakan yang memberi ruang kepada pasar untuk merampas sumber daya MS. Kuatnya koalisi ini menyebabkan MS semakin tidak percaya pada kekuatan mereka sendiri. Ditambah dengan demokrasi ekonomi tidak berjalan serta ketidakmampuan negara untuk melindungi MS dari pengaruh pasar bebas menambah runyamnya realitas di atas.

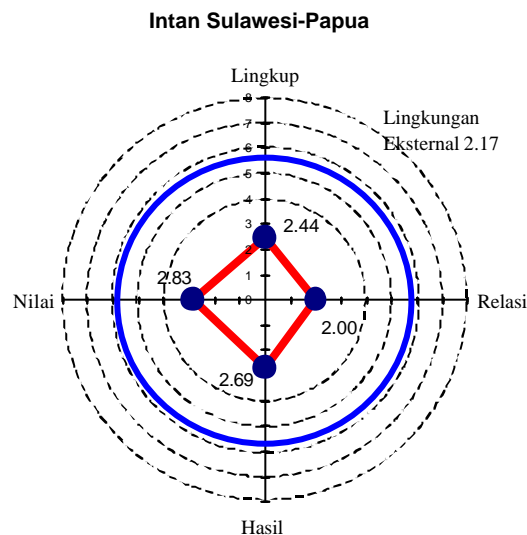
Pada tatanan pengaruh pasar terhadap MS, realitas Nusa Tenggara menggambarkan bahwa kontribusi pasar terhadap penguatan MS masih sangat kecil. *Profit oriented* menyebabkan eksploitasi besar-besaran pasar terhadap MS dan sumber daya MS. Semangat solidaritas

MS makin luntur karena egoisme individu yang dibawa pasar. Demikian juga terhadap lingkungan sosial dan ekonomi, pengaruh pasar sangat negatif untuk MS. Lingkungan makin terdegradasi, kemiskinan makin meluas dan kesenjangan sosial makin tinggi. Hal ini menggambarkan kenyataan bahwa pasar lebih dermawan terhadap negara ketimbang MS.

Pada tatanan kualitas hubungan MS - negara, realitas Nusa Tenggara menunjukkan pada satu sisi negara menerima dan mendukung (walau tidak sepenuhnya) OMS yang otonom, namun di sisi lain masih sulit OMS membebaskan diri dari campur tangan negara yang merugikan. Interaksi antara penggiat OMS dan negara terjadi namun kurang produktif. Ini terlihat dari masih banyaknya produk kebijakan yang belum sepenuhnya berpihak pada MS.

4.2.5 Region Sulawesi-Papua

Secara umum kondisi masyarakat sipil di Sulawesi-Papua menunjukkan skor 2,43 yang berarti kurang sehat, hasil pada masing-masing dimensi dapat dilihat sebagai berikut: (detail skor pada masing-masing indikator dapat dilihat dalam lampiran 2E)



Gambar 6 Visualisasi intan hasil region Sulawesi-Papua

Secara umum region ini menilai bahwa tingkat kesehatan masyarakat sipil di region ini kurang sehat dengan rincian interpretasi pada masing-masing dimensi sebagai berikut:

Dimensi Lingkup

Dimensi lingkup menunjukkan skor 2,44 atau kurang sehat. Beberapa hal yang mendasarinya antara lain gerakan bersama atas tuntutan pemenuhan kebutuhan, keadilan dan pemenuhan hak-hak masih bersifat parsial belum merupakan aliansi, sementara dampak paradigma lama masih sangat berpengaruh, termasuk pengetahuan dan pemahaman politik warga masih sangat terbatas. Kondisi ini berpengaruh terhadap lemahnya daya kritis masyarakat.

Selain itu kondisi OMS dalam membangun kebersamaan dan kerjasama belum terlahir atas dasar idealisme dan dalam rangka perwujudan *civil society*. Tindak lanjut agenda bersama yang dibangun secara lintas propinsi antar OMS untuk membicarakan isu-isu region belum ada dan juga masih ada kondisi saling curiga diantara OMS.

Seperti wilayah lainnya kondisi OMS juga dirasa belum mandiri, ketergantungan terhadap donor serta sistem manajemen yang belum profesional turut berkontribusi atas penilaian dimensi ini.

Dimensi Hasil

Dimensi ini menunjukkan skor yang cukup sehat (2,69). Walau ada hal-hal yang miris menyangkut program pemberdayaan masyarakat yang cenderung berorientasi proyek, proses penyebaran informasi pendidikan yang masih kurang optimal dan efektif serta kian meningkatnya resistensi negara terhadap masyarakat sipil. Namun paling tidak hasil nyata kerja-kerja ditingkat *grass root* dan advokasi kebijakan sudah cukup diperhitungkan.

Dimensi Relasi

Dimensi ini menunjukkan skor terendah diantara seluruh dimensi (2,00) yang bermakna kurang sehat. Fakta-fakta yang mendukung diantaranya bahwa hubungan masyarakat sipil - negara masih cenderung didominasi oleh perilaku individu yang berimplikasi pada rendahnya kualitas hubungan masyarakat sipil dengan negara (secara institusional).

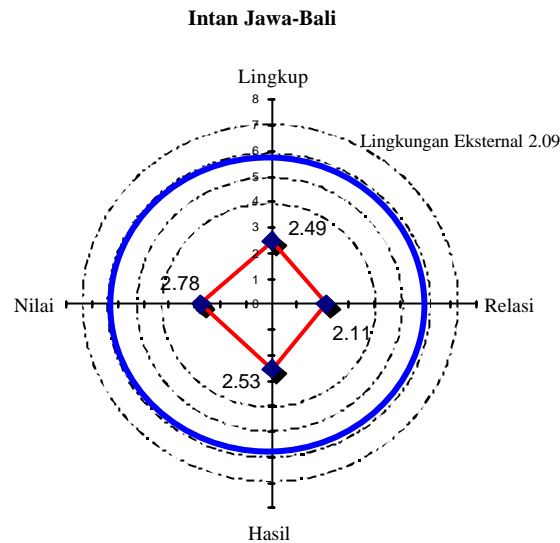
Di sisi lain dominasi kolaborasi negara dengan pasar menyebabkan sistem penentuan harga, sistem distribusi, dan sistem pengupahan tenaga kerja melemahkan masyarakat sipil. Sementara itu masyarakat sipil cenderung masih dianggap sebagai obyek pasar.

Dimensi Nilai

Dari seluruh dimensi, dimensi nilai berada pada kondisi yang paling baik dengan skor 2,83 merupakan indikasi cukup sehat. Hal yang menunjukkan dukungan atas dimensi ini yaitu nilai-nilai dan kearifan masyarakat lokal dan adat masih hidup dan berlaku pada beberapa masyarakat tertentu. Walau kadang nilai partisipasi masyarakat dan demokrasi masih cenderung rendah dan pelanggaran HAM masih terjadi dimana-mana.

4.2.6 Region Jawa-Bali

Secara umum kondisi masyarakat sipil di Jawa-Bali menunjukkan skor 2,40 yang berarti kurang sehat, hasil pada masing masing dimensi dapat dilihat sebagai berikut: (detail skor pada masing-masing indikator dapat dilihat dalam lampiran 2F)



Gambar 7 Visualisasi intan hasil region Jawa -Bali

Skor rata-rata yang kurang menggembirakan ini menunjukkan masih adanya kecenderungan kesehatan OMS dalam region Jawa-Bali belum begitu baik. Berikut interpretasi ringkas dari hasil yang digambarkan di atas.

Dimensi Lingkungan Eksternal

Bila dilihat dari masing-masing dimensi, nilai yang paling rendah adalah nilai untuk dimensi lingkungan (2,09). Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan untuk OMS di Indonesia belum begitu kondusif untuk perkembangan OMS. Bila dilihat lebih detail, dari empat subdimensi yang ada pada dimensi lingkungan, ternyata subdimensi konteks hukumlah yang mendapat skor paling rendah (1,72). Bila dibandingkan dengan kenyataan di Indonesia, kiranya nilai ini tidak jauh dari kenyataan di mana aspek penegakan hukum (*law enforcement*) di Indonesia masih kelihatan carut-marut. Nilai subdimensi konteks hukum ini sedikit di bawah subdimensi politik (1,92) dan subdimensi sosial ekonomi (2,17). Yang cukup mengejutkan subdimensi hak-hak rakyat sipil mendapat nilai cukup tinggi (2,56).

Dimensi Lingkup

Dimensi lingkup memiliki skor 2.49 dengan nilai terendah adalah subdimensi sumber daya OMS (2.20). Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan OMS masih belum baik karena belum didukung oleh sumber daya yang memadai. Penyebab rendahnya sumber daya adalah kapasitas dan akuntabilitas OMS yang masih rendah.

Dimensi Relasi

Dari empat dimensi internal, ternyata skor yang paling rendah adalah dimensi relasi Masyarakat Sipil (2,11). Dari empat subdimensi yang ada dalam dimensi relasi Masyarakat Sipil yang mendapatkan skor paling rendah adalah subdimensi pengaruh pasar terhadap Masyarakat Sipil (1,85). Mungkin ini menunjukkan bahwa dunia pasar di Indonesia

(*market, business*) memang belum mempunyai peran yang signifikan dalam pemberdayaan Masyarakat Sipil.

Angka tersebut juga dapat diinterpretasikan bahwa posisi tawar Masyarakat Sipil terhadap pasar masih rendah serta pelaku pasar masih diskriminatif terhadap Masyarakat Sipil.

Dimensi Nilai

Bisa dimengerti bahwa dimensi nilai mempunyai skor yang paling tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai masyarakat sipil masih dianggap sebagai salah satu kekuatan masyarakat sipil di Indonesia, baik dilihat dari kacamata lokal maupun universal. Lihat saja subdimensi HAM dan anti kekerasan mempunyai skor yang paling tinggi dibanding semua subdimensi dalam empat dimensi yang lain (2,93). Walau HAM merupakan konsep nilai yang relatif baru di Indonesia tetapi tetap mendapat tempat yang baik dalam percaturan Masyarakat Sipil di Indonesia.

Namun perlu disadari pula bahwa walaupun subdimensi HAM mendapatkan nilai tertinggi tetapi masih jauh dari sempurna. Banyaknya kasus-kasus pelanggaran HAM yang mengalami impunitas serta tingginya mentalitas militerisme dapat menjadi contoh.

Dimensi Hasil

Dimensi ini mendapat skor 2.53. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa peran masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan publik untuk memperjuangkan hak-haknya sudah ada tetapi belum maksimal.

Subdimensi kesejahteraan sosial mendapat skor terendah, yaitu 2.24. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa tidak ada pembagian kerja antara pasar, negara dan Masyarakat Sipil dalam menyediakan pelayanan dasar penduduk. Hal ini disebabkan negara lebih berfungsi sebagai penguasa bukan pelayan. Permasalahan kesejahteraan sosial ini juga disebabkan belum adanya regulasi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.